Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016

JURNAL

Oleh :

Nama	:	Dewi Silfa Fina
Nomor Mahasiswa	:	14313125
Program Studi	:	Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dikota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016

DEWI SILFA FINA

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Dewisilva771@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Dimana variabel independent adalah Jumlah Penduduk, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto sedangkan variabel dependent yaitu Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dengan periode pengamatan dari tahun 2010-2016 yang dilakukan di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan yaitu: Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan alat regresi data panel model *fixed effect*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan negative, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Sedangkan variable Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Kata kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah, PDRB.*

Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas yaitu diberlakukanya Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota. Otonomi Daerah adalah kewajiban daerah otonom dan hak kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu sesuai UU No. 32 Tahun 2004 Bab III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal diperlukan dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak dapat berjalan optimal jika pemerintah daerah tidak cukup memadai kemampuan finansialnya (Raisa, 2015).

Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan tercapainya pelayanan publik yang memadai. Dengan adanya dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan kemandirian pada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah tidak seharusnya bergantung secara terus menerus kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemerintahan, namun pemerintah daerah diwajibkan dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Dalam UU No.12 Tahun 2008, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sendiri daerahnya dan memenuhi kebutuhan masing-masing daerah serta pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan adalah suatu proses pembangunan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang memiliki tujuan untuk meningkatkan

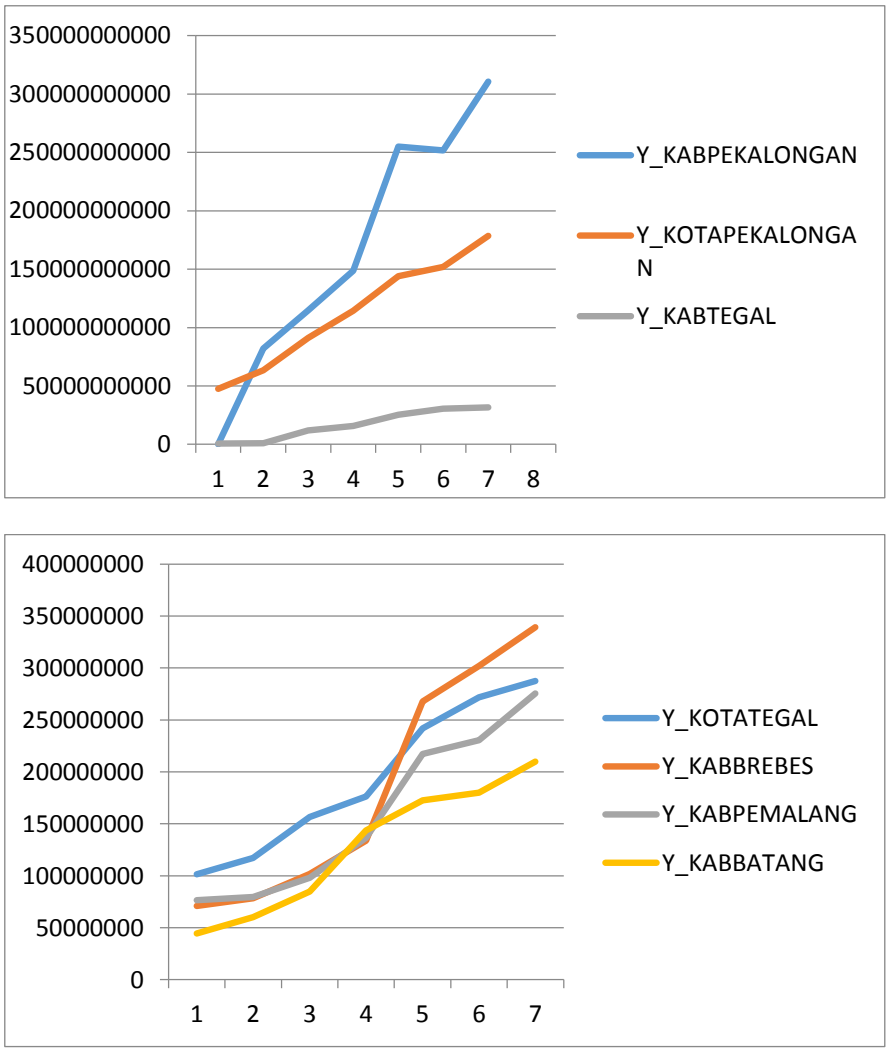
kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang ada agar lebih mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah tersebut (Mulyadi, 2013). Untuk mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi sumber penerimaannya.

Sesuai UU No.23 tahun 2004 pasal 285, bentuk sumber-sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer lain-lain dan pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dalam bentuk pungutan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan daerahnya sendiri secara optimal dengan cara menggali potensi yang ada dan mengembangkan sumber potensional di daerahnya.

Secara nasional berdasarkan data BPS (2015) Jawa tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki PAD yang tinggi. Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang memiliki keunikan. Pada setiap Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki berbagai macam kebudayaan, potensi dan ciri khas tersendiri. Mulai dari pariwisata, perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

berbeda dan daya dukung yang lebih intensif sehingga berpeluang menghasilkan penerimaan daerah yang besar disetiap kabupaten/kotanya.

Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016



Sumber: BPS (Data Diolah)

Pendapatan Asli Daerah di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahunnya. Pada Kabupaten Pekalongan tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah berjumlah sebesar 255.037.017.000 mengalami penurunan sebesar 251.558.970.000 pada tahun 2015. Penurunan ini diakibatkan karena realisasi penerimaan laba turun dari target anggaran. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan dari tahun 2010-2016 Pendapatan Asli Daerah di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan mengalami trend positif dengan kecenderungan terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Penelitian ini difokuskan pada masalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan karena disetiap Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan memiliki berbagai macam kebudayaan, potensi dan ciri khas masing-masing. Mulai dari pariwisata, perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda dan daya dukung yang lebih intensif sehingga berpeluang menghasilkan penerimaan daerah yang besar disetiap kabupaten/kotanya. Dengan melihat potensi yang berbeda di setiap daerah eks-karesidenan pekalongan, studi ini ingin melihat apakah penerimaan pajak retribusi daerah sudah mampu memberikan sumbangan terbesar disetiap daerah eks-karesidenan pekalongan agar pembangunan insfrastruktur dan sarana publik lebih dapat ditingkatkan lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Asteria (2015) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian lain dilakukan oleh Santoso dan Rahayu (2005), yang mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah.

Dengan melihat proporsi Jumlah penduduk, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah dan PDRB. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti Pendapatan Asli Daerah di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan dengan menjadikan hasil karya ilmiah yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan Tahun 2010-2016".**

Rumusan Masalah

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
2. Apakah Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
3. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
4. Apakah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Kajian Teori dan Hipotesis Penelitian

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah dapat mengali sumber pendapatan asli daerah secara optimal. Dengan demikian pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan berupa potensi daerah dan pendapatan asli daerah yang lain-lain secara sah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Hipotesis Penelitian

1. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi bisa juga sebagai beban. Pembangunan sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Budiharjo, 2003). Setiap kenaikan jumlah penduduk bukan jadi masalah melainkan bisa dijadikan sebagai pertumbuhan dan berkembangan di suatu wilayah karena penduduk memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka nilai investasi disuatu wilayah akan meningkat. Bisa dilihat dari pungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah disuatu wilayah tertentu.

2. Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori pembangunan, menyatakan bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat, karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak (Reza, 2009). Menurut Mardiasmo (2004)

pengoptimalisasian penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dilakukan pemerintah seharusnya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat akan lebih mudah dan patuh membayar retribusi dari pada pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami perubahan dan perkembangan. Apabila kualitas dan kuantitas layanan publik meningkat maka masyarakat akan lebih banyak yang aktif dan bersemangat dalam bekerja yang menyebabkan bertambahnya produktivitas kerja.

3. Hubungan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Teori Adolf Wanger (Hukum Wagner)**,** menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. Berkaitan dengan hukum Wagner, ada beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah ada 5 hal yaitu perkembangan ekonomi, tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang

mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

4. Hubungan PDRB tethadap Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi melalui desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/ pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik (Oates dalam Hadi Sasana, 2009:106). Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan PAD dan PDRB merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

   Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota/Kabupaten Jawa Tengah dan Badan Keuangan. Adapun data yang dipublikasikan secara berkala periode 2010-2016. Ada beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Pendapatan Asli Daerah (Y), Jumlah Penduduk (X1), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(X2), Belanja Daerah (X3) dan PDRB(X4).

2. Definisi Operasional

Untuk variabel dependent Pendapatan Asli Daerah(PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang didapatkan dari pungutan berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan berupa potensi daerah dan pendapatan asli daerah yang lain-lain secara sah sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk Variabel Independet ada 4 yaitu Jumlah Penduduk, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Belanja Daerah dan PDRB

- **Jumlah Penduduk**

  Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili disuatu daerah atau wilayah tertentu.

- **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

  Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah atau gabungan dari pajak daerah ditambah dengan retribusi daerah yang dihasilkan dari pungutan yang wajib dibayarkan kepada pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- **Belanja Daerah**

  Semua pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatan perekonomian.

- **PDRB**

  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah penerimaan dari daerah sendiri pada berbagai sektor yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahunya.

Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi dengan metode data panel dengan program eviews 9. Data panel merupakan data dari gabungan time series dan cross section. Dan model yang digunakan adalah *Fixed Effect Models*, yaitu metode untuk mengetahui adanya perbedaan (intersep) namun slopenya tetap sama antar variabel. Model persamaan regresinya sebagai berikut

$$lnYit = \beta_{0i} + \beta_1 lnX_1it + \beta_2 lnX_{2it} + \beta_3 lnX_{3it} + \beta_4 lnX_{4it}\, e_{it}$$

Analisis dan Pembahasan

Model Log-Linear Dengan Uji MWD

Hasil Regresi Model Log Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.840782	1.116679	-4.334980	0.0001
LOG(X1)	-1.032070	0.080787	-12.77518	0.0000
LOG(X2)	0.046760	0.048909	0.956059	0.3444
LOG(X3)	1.457739	0.184821	7.887318	0.0000
LOG(X4)	0.601790	0.190348	3.161527	0.0029
Z2	-1.86E-06	1.31E-06	-1.420946	0.1625

Sumber: Data Diolah

Hasil uji MWD untuk model log-linear didapatkan probabilitas Z2 sebesar 0.1625 > α = 5% yang berarti Z2 tidak signifikan maka menerima hipotesis alternatif sehingga model yang benar adalah log linier. Berdasarkan dua pengujian tersebut maka model yang baik untuk penelitian ini adalah log linier.

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.

Cross-section F	14.447775	(6,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	58.222664	6	0.0000

Sumber: Olahan Data Eviews

Nilai probabilitas *cross section chi square* hasil pengujian uji chow dengan menggunakan Eviews 9 adalah sebesar 0.0000 < α5% , maka hasilnya signifikan sehingga menolak H_0 berarti gagal menolak Ha, maka model yang tepat digunakan adalah model Fixed Effect.

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.794309	4	0.0000

Sumber: Olahan Data Eviews

Nilai *cross section Random* adalah sebesar 0.0000 < α = 5%, maka hasilnya signifikan sehingga menolak H_0 berarti gagal menolak Ha maka model yang tepat digunakan adalah model Fixed Effect.

Hasil Regresi Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	-7.163699	2.963078	-2.417654	0.0205
LOG(X2)	0.122134	0.037016	3.299501	0.0021
LOG(X3)	-0.073284	0.255266	-0.287087	0.7756
LOG(X4)	2.987719	0.451627	6.615462	0.0000
C	59.45364	36.50216	1.628771	0.1116
R-squared	0.968019	Mean dependent var		11.85754
Adjusted R-squared	0.959602	S.D. dependent var		0.557639
F-statistic	115.0192	Durbin-Watson stat		1.902203
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olahan Data Eviews

$\text{Log } Y_{it} = 59.45364 - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it} + U_{it}$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

β_0 = Koefisien Intersep

β_1 = Koefisien Pengaruh X1 (Jumlah Penduduk)

β_2 = Koefisien Pengaruh X2 (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

β_3 = Koefisien Pengaruh X3 (Belanja Daerah)

β_4 = Koefisien Pengaruh X4 (PDRB)

Dari hasil pengelohan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-Squared) artinya variasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 96,8019% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji Determinasi dan Uji Overal

R-squared	0.968019
Adjusted R-squared	0.959606
S.E. of regression	0.112081
Sum squared resid	0.477358
Log likelihood	43.93910
F-statistic	115.0192
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data Diolah

Dari hasil pengujian diperoleh nilai R^2 sebesar 0.968019 yang artinya variabel Jumlah Penduduk, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Belanja Daerah dan PDRB mampu menjelaskan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebanyak 96, 80% sedangkan sisanya sebesar 3, 20% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Simultan (Uji F-test)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai Probalitas F statistik sebesar 0.0000 < α 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Belanja Daerah, PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Partial (t-test)

Pengujian Hipotesis

Variabel	Coefficient	Prob. T test	Keterangan
Jumlah Penduduk	-7.163699	0.0205	Signifikan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0.122134	0.0021	Signifikan
Belanja Daerah	-0.073284	0.7756	Tidak Signifikan
PDRB	2.987719	0.0000	Signifikan

Sumber: Data Diolah

1) Jumlah Penduduk

Koefisien dari variabel Jumlah Penduduk sebesar -7.163699 sedangkan probabilitas t statistiknya sebesar 0.0205 < α=5% maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a. Hal ini berarti secara stastistik menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Hal ini berarti

jika jumlah penduduk naik sebesar 1% maka PAD akan turun sebesar 7.163699%.

2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Koefisien dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0.122134 dan probabilitas sebesar 0.0021 < α=5% maka menolak H_0 dan gagal menolak H_a. Hal ini berarti secara stastistik menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Artinya, jika Pajak Daerah dan Retribusi Daerah naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 0.122134% .

3) Belanja Daerah

Koefisien dari variabel Belanja Daerah adalah sebesar -0.073284 dan probabilitas sebesar 0.7756 > α=5% maka menolak H_a dan gagal menolak H_0 . Hal ini berarti secara statistik menujukkan bahwa variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Artinya, jika Belanja Daerah naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar -0.073284%.

4) PDRB

Koefisien dari variabel PDRB adalah sebesar 2.987719 dan probabilitas sebesar 0.0000 < α=5% maka menolak ho atau menerima ha. Hal ini berarti secara statistik menujukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan arah hubungan yang positif di

Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Artinya jika PDRB naik sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 2.987719%.

Persamaan Regresi:

1) Kab Pekalongan

$\log Y = (59.45364 + 1.021978) - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

$\log Y = \mathbf{60.475618} - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

2) Kota Pekalongan

$\log Y = (59.45364 - 4.927147) - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

$\log Y = \mathbf{54.526493} - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

3) Kab Tegal

$\log Y = (59.45364 + 3.369586) - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

$\log Y = \mathbf{62.823226} - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

4) Kota Tegal

$\log Y = (59.45364 - 6.557374) - 7.163699 \log X_{1it} + 0.122134 \log X_{2it} - 0.073284 \log X_{3it} + 2.987719 \log X_{4it}$

LogY= **49.896266** – 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

5) Kab Brebes

LogY= (59.45364 + 4.041430) – 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

LogY= **63.49507** – 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

6) Kab Pemalang

LogY= (59.45364 + 3.458148) – 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

LogY= **62.911788 –** 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

7) Kab Batang

LogY= (59.45364 – 0.406621) – 7.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

LogY= **59.047019 7**.163699 $\log X_{1it}$ + 0.122134 $\log X_{2it}$ – 0.073284 $\log X_{3it}$ + 2.987719 $\log X_{4it}$

Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Cross Section

Daerah	Cross Effect

Cross Section	Kab. Pekalongan	1.021978
	Kab. Batang	-0.406621
	Kab. Brebes	4.04143
	Kab. Tegal	3.369586
	Kab. Pemalang	3.458148
	Kota Pekalongan	-4.927147
	Kota Tegal	-6.557374

Sumber: Data Diolah

Dari hasil tersebut menunjukan nilai intersep dari masing-masing Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Melalui tabel ini dapat dilihat Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan dengan nilai intersep tertinggi adalah kabupaten Brebes yaitu sebesar 63.49507 artinya jika semua variabel independent bernilai 0 maka PAD kabupaten Brebes sebesar 4.041430. Sedangkan nilai intersep terendah adalah Kota Tegal sebesar 52.896266 artinya ketika semua variabel independen bernilai 0 maka PAD Kota Tegal sebesar -6.557374.

Analisis Ekonomi

1. **Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.**

Variabel ini berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2010-2016 dengan p-value 0.0205 < α= 5%. Karena jumlah penduduk belum tentu mencerminkan kualitas

atau produktivitas peduduk itu sendiri berbeda dengan IPM lebih mencerminkan kualitas dari penduduk. Dalam hal ini jumlah penduduk bisa terdiri dari orang bekerja, ibu rumah tangga, orang cacat, mahasiswa, anak sekolah, anak baru lahir, anak bayi dan pengangguran. Dalam kasus penduduk usia belum masuk pada usia produktif tentu belum mampu menyumbang PAD sedangkan jumlah penduduk usia produktif mampu untuk menyumbang PAD. Dengan tingginya jumlah penduduk yang bekerja akan meningkatkan produktivitas output yang dihasilkan yang selanjutnya akan meningkatkan pajak daerah melalui pajak yang dikenakan.

Kondisi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan sedanng mengalami peralihan sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi sejak tahun 2010, dalam peralihan stuktur perekonomian dari pertanian ada beberapa masyakat yang tidak dapat masuk bekerja di sektor industri karena keahlian yang berbeda, dimana sektor pertanian masih tradisoal, berbeda dengan industri harus mempunyai keahlian terentu untuk dapat bekerja didalamnya, perubahan stuktur ekonomi menjadikan atau teciptanya Pengangguran.

2. **Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.**

Variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki arah hubungan yang positif di Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2010-2016 dengan p-value 0.0021 <5%. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kemampuan

suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. **Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.**

Variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2010-2016 dengan p-value 0.7756% < α=5%. Hal ini berarti belanja daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Pekalongan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Pekalongan.

Pada kasus Kabupeten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini diduga karena alokasi anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai tidak langsung. Seperti yang terjadi di kabupaten pekalongan alokasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 75.5%. pada tahun 2016. Sementara di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 alokasi belanja pegawai tidak langsung mencapai 54.40% dari keseluruhan belanja daerah. Sementara tahun 2016 belanja pegawai tidak langsung sebesar 44.79%. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian, karena secara implisit daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan

keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kualitas belanja daerah bisa dilihat dari porsi Belanja Pegawai Tidang Langsung dan Belanja Modal atau belanja pembangunan. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi Belanja Pegawai Tidak Langsung (belanja aparatur) dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan Belanja Langsung terutama Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan layanan publik yang dapat mendorong roda perekonomian daerah. Meskipun tahun 2016 belanja pegawai di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 namun porsi alokasi belanja pegawai masih cukup besar. Dengan demikian kualitas belanja daerah dikabupaten tersebut belum cukup baik sehingga belanja daerah tidak mampu mendorong peningkatan PAD.

4. Analisis Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/ Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

Berdasarkan hasil pengujian PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Eks-Karesidenan Pekalongan tahun 2010-2016 dengan p-value 0.0000 < α=5%. Hal ini berarti peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan

baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.

Adanya Kenaikan di bidang Indutri pengolahan Pada beberapa Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan menggambarkan adanya peningkatan pendapatan seseorang yang menjadikan kemampuan membayar pajak menjadi meningkat dan menambah penerimaan PAD. Dilihat dari banyaknya jumlah industri yang berada di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan maka dengan meningkatnta PDRB akan meningkatkan PAD diKota/Kabupaten Eks-Karesidenan Pekalongan**.**

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolahan dan analisis ekonomi dari penelitian diatas. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Model estimasi regresi data panel yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect* setelah dilakukan Uji Hausman. Hasil koefisien uji determinasi (R2) adalah sebesar 0.968019 artinya, variabel PAD dapat dijelaskan oleh 4 variabel independent (Jumlah Penduduk, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Belanja daerah dan PDRB) sebesar 96,80% sedangkan sisanya 3,20% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.
2. Pada Uji F nilai F-hitung sebesar 115.0192 dengan probabilitas 0.000000 <5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan estimasi Fixed Effect Model, variabel Jumlah Penduduk, Pajak daerah dan Retribusi daerah, Belanja

Daerah, PDRB dalam penelitian secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Artinya jika Jumlah Penduduk mengalami kenaikan maka PAD akan mengalami penurunan. Karena pada kenyataannya keterlibatan penduduk dalam kontribusi PAD suatu daerah sangat tinggi, bahkan peningkatan jumlah penduduk sangat dibutuhkan dan penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu penerimaan PAD terdiri dari pajak daerah maka semakin tinggi jumlah penduduk penerimaan PAD nya semakin meningkat.
4. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tinggi akan menyebabkan kenaikan PAD yang berarti di Kabupaten dan Kota Eks-Karesidenan Pekalongan penduduknya patuh membayar pajak dan Retribusi. Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditandai dengan pembangunan sarana prasarana dan infastruktur pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Variabel Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. karena naik turunya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. hal ini diduga karena disparitas yang cukup besar antar kabupaten dan kota di eks-karesidenan pekalongan, sehingga belanja

daerah tidak di tentukan oleh besar kecilnya PAD yang dicapai, sehingga belanja daerah banyak didukung dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

6. Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap PAD dikabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. karena semakin besar PDRB maka PAD yang didapatkan akan meningkat.

Implikasi

1. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat melalui peningkatan kualitas pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Pemerintah daerah bisa memberikan pelatihan khusus dan lebih banyak membuka sekolah kejuruan atau politeknik agar SDM memiliki ketrampilan diberbagai bidang. Disamping itu pemerintah daerah dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak bersifat padat karya agar jumlah penduduk disuatu wilayah tersebut memiliki tingkat produktivitas yang tinggi sehingga kualitas sumber daya manusianya meningkat.
2. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi setiap kekuatan yang dimiliki oleh setiap wilayah, memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya sehingga mampu

mengoptimalkan pertumbuhan ekonomin. Dalam hal ini pemerintah diharpakan mampu mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang menjadi unggulan, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ari, Budiharjo, (2003). *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Di Ponegoro, Semarang.

Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah dalam angka* beberapa terbitan. BPS Provinsi Jawa Tengah.Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah. Tahun 2017. Retrieved November 27, 2017, from http://www.bps.com

Beta, Asteria. (2015) "*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*", *Jurnal Riset Manajemen* Vol.2, No.1, Januari 2015, 51-61.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta : Andi.

Muhammad, Reza.A. (2015) "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013*", Skripsi Sarjana, (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Oates (1993), "*Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi*".

Raysa, Desyaratami. H. (2015) '*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2012*", Skripsi Sarjana, (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Santoso, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Puji. (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor – faktor yang mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri.* Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP) volume 2 (Nomor 1) pp-9-18.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.